



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021– 2026. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan yang selanjutnya dibahas dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Wonogiri dan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Wonogiri bidang Pengawasan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
22. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah :

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2025 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Pedoman dan penentu arah bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025;
- c. Menyiapkan rencana program Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025;
- d. Menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025;
- e. Menyiapkan rencana sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025;
- f. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri; dan
- g. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD dan keterkaitan Dokumen Perencanaan yang lain.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan organisasi, serta pedoman penyusunan perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan susunan garis besar isi dan pokok bahasan Renja OPD.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Periode 2021-2026

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya yang selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD (baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya), serta menyajikan tabel rencana

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatifnya untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Periode 2021 – 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2023 dengan capaian kinerja yang disesuaikan dengan dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 total anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 8.031.606.790,00 yang ditujukan untuk mendukung 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.739.420.244,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 83,91%. Sedangkan pencapaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2024 belum dapat dilihat capaiannya dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri periode 2021 – 2026.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	100%	100%	99,49%	99,49%	100%	100%	100%
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	5	3	3	100%	3	11	65%
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	100%	100%	95,93%	95,93%	100%	100%	100%
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	41	41	36	87,80%	41	41	100%
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	1	1	100%	1	4	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	80	28	13	13	100%	13	54	68%
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	0	0	0%	0	1	20%
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	2	5	5	100%	5	12	120%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	2	0	0	0%	0	2	20%
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8	8	8	8	100%	8	8	100%
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	0	1	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120	24	24	24	100%	24	72	60%
6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	64	26	12	16	133%	12	54	84%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	3	60%
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	315	115	50	50	100%	50	215	68%
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	10	0	0	0%	0	10	20%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	67%
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	1	1	1	0%	1	3	50%
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	67%
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	67%
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	24	12	12	100%	12	48	67%
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	92	32	20	20	100%	20	72	78%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	65	15	15	100%	15	95	76%
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	1	2	2	100%	2	5	56%
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	0	2	2	0%	0	2	8%
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	0	10	10	0%	4	14	47%
6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	4	4	0%	3	7	140%
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	24	12	12	100%	12	48	67%
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	24	12	12	100%	12	48	67%
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	24	12	12	100%	12	48	67%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	2	2	2	100%	2	6	60%
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	36	14	14	100%	11	61	60%
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	3	3	3	100%	3	9	56%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49	9	10	10	100%	10	29	59%
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	1	1	100%	1	4	67%
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	0	0	0%	0	1	20%
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	0	0	0%	0	1	20%
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100%	100%	100%	109,09%	109,09%	100%	100%	100%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	815	265	135	135	100%	132	396	49%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38	22	8	8	100%	9	39	103%
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25	5	5	5	100%	5	15	60%
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	324	108	53	53	100%	53	214	66%
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	2	1	1	100%	1	4	67%
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	189	57	30	30	100%	30	117	62%
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	1	1	1	100%	1	3	60%
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	228	70	37	37	100%	37	144	63%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	587	195	99	117	118,18%	99	290	49%
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	2	2	2	100%	2	6	60%
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	577	193	97	115	118,56%	97	405	70%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase realiasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	66	65	11	11	100%	11	33	50%
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16	15	1	1	100%	1	17	106%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	50	10	10	10	100%	10	30	60%
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	55	18	9	9	100%	9	28	51%
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	53	53	53	100%	53	53	100%
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	15	53	53	100%	53	53	100%
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	5	5	5	100%	5	5	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	53	53	53	100%	53	53	100%

Pada tabel 2.1 yang tersaji di atas, dapat diuraikan penjelasannya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 didukung dengan 3 program utama dengan capaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Di tahun 2023, program ini terealisasi 99,94% seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1 jika pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terealisasi 100% karena targetnya 41 orang/bulan namun di tahun 2023 mengalami penurunan jumlah pegawai karena mutasi dan pensiun sehingga tidak dapat tercapai 100%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2023 sebesar Rp. 7.327.286.846,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.115.727.264,00 (83,47%) selama satu tahun anggaran 2023.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 8 kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Di tahun 2023, kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 3 dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA dan DPA) yang

telah terealisasi sesuai targetnya dengan capaian kinerjanya 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 13.650.000,00 dan telah terserap sebesar Rp. 7.072.500,00 (51,81%) selama satu tahun anggaran 2023.

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang difokuskan untuk penyusunan dokumen laporan kinerja dengan outputnya adalah 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah terealisasi sesuai targetnya dengan capaian kinerjanya 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 345.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 260.000 (75,36%) selama satu tahun anggaran 2023.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

Selain terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output dari kegiatan ini adalah 13 laporan keuangan (12 laporan keuangan bulanan dan 1 laporan keuangan semester I karena laporan keuangan semester II atau akhir tahun sudah masuk dalam laporan bulanan di Bulan Desember). Namun realisasi atas kegiatan ini adalah belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pada Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 41 orang / bulan tidak terpenuhi karena adanya mutasi dan pensiun pegawai di Inspektorat Tahun Anggaran 2023 sehingga persentase capaian kegiatan ini adalah 95,93%.

Alokasi anggaran dana untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 6.434.529.507,00 dan telah terserap sebesar Rp. 5.335.017.227,00 (82,91%).

c. Administrasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan outputnya 5 dokumen (1 dokumen terkait perencanaan BMD, 2 dokumen terkait pengamanan BMD dan 2 dokumen atas rekonsiliasi laporan BMD). Kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp1.000.000,00 (100%).

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 sub kegiatan yang difokuskan selain untuk administrasi kepegawaian seperti administrasi kenaikan pangkat jabatan dan lainnya, kegiatan ini juga untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai bimtek dan diklat. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 200.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 139.303.827,00 (69,58%).

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 10 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 4) Penyediaan bahan logistik kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Fasilitas kunjungan tamu;
- 8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 9) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; dan

10) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

Kegiatan ini difokuskan untuk penyediaan terhadap kebutuhan administrasi umum pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor seperti yang telah diuraikan ke dalam beberapa sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 215.777.652,00 dan telah terserap sebesar Rp. 205.904.623,00 (95,42%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
- 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor seperti materai (surat menyurat), peralatan perlengkapan kantor dan terbayarnya jasa tenaga kontrak dan internet, air dan listrik dan yang lainnya seperti yang diuraikan ke dalam sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 227.602.000,00 dan telah terserap sebesar Rp. 208.654.398,00 (91,68%).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 3) Pemeliharaan mebel;

- 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- 5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana pendukungnya, serta pemeliharaan terhadap mebel yang terdapat di kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan terhadap BMD (kendaraan dinas, gedung dan mebel). Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 125.475.007,00 dan telah terserap sebesar Rp. 118.193.689,00 (94,20%).

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini difokuskan untuk Belanja Modal dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan di Inspektorat dan capaian kegiatan ini adalah 100 dengan telah terealisasinya pengadaan barang berupa printer, scanner, laptop, rak arsip, dan mesin pemotong kertas serta perlengkapan pendukung gedung lainnya seperti gordena dan lampu hias dengan total anggaran Rp. 108.707.680,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 100.321.000,00 (92,29%).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan ini adalah persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan pengawasan dalam satu tahun anggaran 2023.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan di tahun 2023 sebesar

Rp. 364.822.856,00 dan terealisasi sebesar Rp. 327.528.458,00 (89,78%). Kemudian, untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan, diimplementasikan melalui 2 kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal di tahun 2023 sebesar Rp. 195.430.356,00 dan terealisasi sebesar Rp. 172.135.200,00 (88,08%).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, diimplementasikan melalui 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan untuk pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah. Output dari sub kegiatan ini adalah 8 laporan atas audit kinerja program strategis selama satu tahun anggaran. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 16,750.000,00 yang telah terserap sebesar Rp. 14.655.500,00 (87,50%).

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan untuk asistensi terkait pengawasan keuangan seperti asistensi penyusunan LKPD, pendampingan pemeriksaan BPK Pendahuluan dan Terinci atas kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan targetnya 5 laporan yang telah tercapai 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 29.000.000,00 yang telah terserap sebesar Rp 22.592.500,00 (77,91%).

3) Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap laporan kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) untuk meningkatkan pemahaman OPD atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Pemahaman yang lebih baik, ditunjukkan dengan skor hasil evaluasi yang tinggi sehingga laporan atas kinerja OPD dapat diyakini akuntabilitasnya. Hal tersebut diharapkan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan akuntabilitas yang tinggi pada setiap OPD.

Pada tahun 2023, output sub kegiatan revidi laporan kinerja ditargetkan sebanyak 53 laporan (25 Kecamatan dan 28 Dinas/Badan) dan telah terealisasi sesuai targetnya 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 8.617.356,00 yang telah terserap sebesar Rp 8.072.900,00 (93,68%).

4) Revidi Laporan Keuangan

Sub kegiatan revidi laporan keuangan dengan targetnya 1 laporan yang telah tercapai 100%, bertujuan agar laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat dipertanggungjawabkan dalam penyajiannya. Sub kegiatan ini terkait erat dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sampai dengan saat ini LKPD Kabupaten Wonogiri berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut (2016-2023). Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 4.755.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.650.000,00 (97,79%).

5) Pengawasan Desa

Pengawasan Desa adalah pengawasan internal secara berkala pada Pemerintah Desa. Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan serta pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa terhadap Pemerintah Desa. Output sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengawasan atas Desa. Tahun 2023, target kinerja atas sub kegiatan ini adalah 30 laporan dan telah

terrealisasi sebanyak 30 laporan (100%). Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp 77.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 69.260.100,00 (89,95%).

6) Kerjasama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini memfasilitasi adanya kerjasama internal dalam hal pengawasan dengan target 1 laporan yang telah tercapai 100%. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kerjasama antar bidang untuk reviu telaah intern. Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp 952.500,00 (95,25%).

7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan pengawasan ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan dengan melakukan monitoring dan pemantauan tindak lanjut. Target sub kegiatan ini di tahun 2023 adalah 37 laporan yang telah tercapai 100% dengan rincian 2 laporan semesteran ke Provinsi (Ikhtisar Pengawasan Semester I dan II), 1 laporan penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 4 laporan tindak lanjut pemeriksaan Provinsi dan BPK RI Semester I dan II serta 30 laporan tindak lanjut hasil rekomendasi APIP. Anggaran yang disediakan untuk kelancaran sub kegiatan ini sebesar Rp 58.308.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 51.951.700,00 (89,10%).

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di tahun 2023 sebesar Rp 169.392.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 155.393.258,00 (91,74%). Dalam mendukung kegiatan

penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian daerah bertujuan untuk melakukan monitoring/pemantauan terhadap kasus finansial yang menyebabkan kerugian daerah yang dilaporkan per semester dengan targetnya 2 laporan yang telah tercapai 100%. Kemudian untuk mendukung kelancaran sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 737.500,00 (73,75%).

2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan rutin yang telah dilakukan dalam sub kegiatan pengawasan yang lainnya contohnya penanganan kasus/aduan, monitoring evaluasi atas perencanaan gender (PPRG), reviu DAK (Dana Aggaran Khusus) secara Fisik dan yang lainnya yang tidak bisa dikategorikan ke dalam sub kegiatan pengawasan rutin yang lainnya dengan targetnya 97 laporan yang telah terealisasi 115 laporan dengan capaiannya 118,56%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 168.392.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 154.655.758,00 (91,84%).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengawasan yang terangkum dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan telah terealisasi sesuai dengan targetnya pada semua Sub Keempatannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan yang menjadikan kendala dalam pencapaian targetnya. Semua aktivitas di dalamnya masih berjalan sama seperti tahun

sebelumnya di tahun 2022 dengan target yang sama pula sehingga masih dapat tercapai sesuai rencana targetnya.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program ini adalah persentase realisasi Reformasi Birokrasi komponen penguatan pengawasan dengan target 100%. Tahun 2023, program ini terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di tahun 2023 sebesar Rp 339.497.088,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 296.164.522,00 (87,24%).

Untuk mendukung program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, diimplementasikan melalui 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2023 sebesar Rp 28.400.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 26.374.600,00 (92,87%). Dalam mendukung kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2023, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bertujuan untuk melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan melalui penyusunan Jakwas (Kebijakan Pengawasan) dan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang diikuti dengan Rapat Operasional (RO) yang dilaksanakan rutin setiap bulan untuk mengawal seluruh kegiatan pengawasan dalam PKPT setiap bulannya dengan target sub kegiatan 1 laporan PKPT yang telah tercapai sesuai targetnya. Demi

mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 4.900.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.016.500,00 (81,97%).

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi terkait kebijakan pengawasan maupun rapat monitoring atas kinerja pengawasan triwulanan dengan targetnya 10 laporan yang telah tercapai 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 23.500.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 22.358.100,00 (95,14%).

b. Pendampingan dan Asistensi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2023 sebesar Rp 311.097.088,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 269.789.922,00 (86,72%). Dalam mendukung kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2023, diimplementasikan melalui 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan pada pengawasan atas urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh auditor Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) melalui aktivitas pendampingan, asistensi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan outputnya 2 laporan yaitu laporan pendampingan asistensi atas penilaian mandiri SPIP dan pendampingan asistensi atas penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada semua perangkat daerah. Realisasi sub kegiatan ini ditahun 2023 adalah

100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 27.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 18.696.500,00 (69,25%).

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi atas penilaian Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Tahun 2023, sub kegiatan ini ditargetkan dengan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi pada 53 Perangkat Daerah dan telah terealisasi sebesar 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 10.500.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 4.180.500 (39,81%).

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Beberapa aktivitas sebagai implementasi sub kegiatan ini adalah :

- a) Pembangunan ZI (Zona Integritas);
- b) MCP (*Monitoring Center for Prevention*);
- c) Pengendalian Gratifikasi;
- d) Saber Pungli; dan
- e) Survei Penilaian Integritas (SPI).

Tahun 2023, target kinerja sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terealisasi 100% melalui 5 aktivitas pendukungnya (ZI, MCP, Saber Pungli, Gratifikasi dan SPI) dengan outputnya 5 kegiatan sesuai dengan yang telah ditargetkan di tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 268.642.088 dan telah terealisasi sebesar Rp 245.382.922 (91,34%).

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini difokuskan pada pendampingan, asistensi dan verifikasi atas pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara /LHKASN pada 53 perangkat daerah.

Realisasi atas sub kegiatan ini di tahun 2023 adalah 100%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua Sub Kegiatan yang mendukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah tercapai sesuai targetnya karena secara realisasinya terlaksana sesuai rencananya di tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta seluruh program dan kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonogiri maupun dari Dana Alokasi Khusus. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, reuiu, pendampingan dan asistensi.

Analisis kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	-	-	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	-	-	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	2+	3	3	3	
3	-	-	Jumlah Unit Kerja/ Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/ WBBM dalam 1 tahun	1	0	1	1	1	0	1	1	
4	-	-	Indeks Integritas Daerah	65	70	75	80	80,84	81,20	81,25	81,30	
5	-	-	Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	60%	60%	65%	70%	49%	n/a	n/a	n/a	
6	-	-	Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas	60%	70%	75%	80%	92,45 %	100%	100%	100%	
7	-	-	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP	95%	95%	95%	95%	98,92 %	98,90 %	98,92 %	98,92 %	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka ditentukan 2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu : Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Maturitas SPIP pengukurannya adalah berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor PE.09.03/LHP-1019/PW11/3.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 diperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,015 (Level 3). Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman akan SPIP, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan Evaluasi SPIP dan berkoordinasi secara aktif dengan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kabupaten serta menjalin komunikasi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa membuka pintu konsultasi dan koordinasi.

Ukuran capaian atas Kapabilitas APIP adalah berdasarkan Hasil Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan metode *Internal Audit Capability Models* (IACM). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Nomor PE.09.03/LHP-1013/PW11/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 diperoleh skor Kapabilitas APIP 3,00 (Level 3) dengan hasilnya bahwa dari 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berhasil pada posisi Level 3.

Kemudian berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri diperoleh 7 indikator seperti Tabel 2.2 di atas dengan 2 indikator telah diuraikan pada paragraf di atas. Lima indikator kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan tercapainya Indeks SPI dengan angka 81,20 (peringkat 2 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah), Penilaian Evaluasi AKIP dengan 53 OPD berhasil mendapatkan nilai dari BB keatas, dan

persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 98,90% dengan rincian TL atas Provinsi 100%, TL BPK 98,77% dan TL APIP 97,98%. Sedangkan 1 indikator kinerja utama untuk Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai dari 30 keatas dengan realisasinya n/a. Hal ini dikarenakan indikator yang ditetapkan sudah tidak relevan lagi. Indikator Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai dari 30 keatas telah mengalami perubahan di tahun 2023 mengikuti perkembangan saat ini mengakibatkan tidak dilaksanakannya lagi PMPRB dan diganti dengan Evaluasi Internal RB pada 53 Perangkat Daerah. Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berupaya untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan melaksanakan Evaluasi Internal RB Triwulanan pada 53 Perangkat Daerah.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yang seringkali berdampak pada bertambahnya tugas – tugas yang belum dapat ditampung saat penyusunan PKPT. Kondisi ini mengharuskan Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai daya adaptasi yang tinggi, hal ini tentunya harus didukung dengan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM APIP;

2. Kapasitas dan kecukupan SDM APIP yang berkompeten menjadi permasalahan yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Hal ini disebabkan regenerasi yang belum dapat mengimbangi berkurangnya jumlah APIP akibat memasuki masa pensiun;
3. Adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
4. Peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Perhatian Perangkat Daerah yang kurang tentang pentingnya reformasi birokrasi menyebabkan capaian akan hal tersebut masih kurang.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan akhir tahun 2023 akhirnya di Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berhasil meraih Level 3 untuk Kapabilitas APIP yang di tahun-tahun sebelumnya masih di Level 2. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain :

1. kesadaran para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan dan implementasi RB dan Manajemen Risiko;
2. kurangnya perhatian dan tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya;
3. kualitas, kuantitas dan integritas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga pengawas yang profesional;

4. sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha dengan optimal untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Kemudian selain isu dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :

- a. kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK RI, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting;
- b. Sumber Daya Manusia yang cenderung berkurang secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya.

2. Peluang :

- a. peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) atau melalui Pendidikan dan Pelatihan terkait permasalahan-permasalahan yang aktual;
- b. dukungan dan arahan dari pimpinan untuk meningkatkan semangat kinerja pegawai dengan adanya reward setiap tahun bagi pegawai dengan kinerja paling baik;
- c. komitmen seluruh pegawai dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Selain memahami isu, permasalahan serta tantangan dan peluang yang ada, perlu diuraikan juga beberapa dampak yang mungkin terjadi jika Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi berbagai tantangan, isu dan permasalahan tersebut, yaitu :

1. jika tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi APIP, cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK RI);
2. tanpa adanya dukungan dan arahan dari pimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja APIP sehingga tidak ada konsistensi dalam upaya pencapaian target kinerja.

2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahun. Renja 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Disamping itu, dokumen Renja tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, rencana capaiannya dan pendanaan/pagu indikatifnya. Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Program dan kegiatan tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rancangan awal Renja yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang kemudian pada

tahapannya mengalami perubahan pagu anggaran dari rancangan awal renja tahun 2025 sehingga pada pagu anggaran di rancangan akhir renja tahun 2025 berubah. Perubahan ini terjadi karena adanya *refocussing* anggaran. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 secara rinci ditampilkan sebagaimana pada tabel 2.3.

Kemudian, beberapa strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2025 sebagai berikut :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan upaya rekrutmen SDM baru dan mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional;
2. mengupayakan peningkatan kesadaran para Pimpinan OPD dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah, melalui wahana sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat dinas dan koordinasi; dan
3. upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan.

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Rp8.261.160. 590					Rp8.261.160. 590	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100%	Rp7.481.485. 814	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100%	Rp7.479.288. 664	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp4.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp4.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp2.000.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun	100%	Rp6.668.735. 307	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun	100%	Rp6.668.735. 307	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Rp6.666.735.3 07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Rp6.666.735.3 07	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp1.000.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Rp1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp999.940	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp999.940	
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp999.940	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp999.940	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun	100%	Rp187.199.530	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun	100%	Rp177.199.530	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8	Rp999.860	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8	Rp999.860	
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Rp2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Rp2.000.000	
4.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Rp1.999.810	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Rp1.999.810	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Rp999.860	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Rp999.860	
4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp181.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp171.200.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp220.885.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp222.657.400	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp1.999.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp1.997.000	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp54.999.110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp54.999.110	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp1.498.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp1.795.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp44.999.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp39.499.800	
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp19.999.980	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp19.999.980	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Rp2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Rp2.400.000	
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Rp6.992.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Rp8.048.000	
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Rp85.996.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Rp91.919.300	
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Rp999.150	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Rp999.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5.1 0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp999.860	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp999.860	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp44.501.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp44.685.700	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Rp44.501.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Rp38.820.000	
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Rp0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Rp5.865.700	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp244.878.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp247.433.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp4.000.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp41.600.000	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp6.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp9.000.000	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp194.378.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp192.833.900	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp110.285.737	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp113.576.887	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp17.195.520	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp19.694.270	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Rp80.188.617	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Rp80.188.617	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Rp2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Rp2.000.000	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp4.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp4.990.000	
8.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp5.911.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp6.704.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%	Rp425.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%	Rp425.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	135 Laporan	Rp248.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	135 Laporan	Rp248.000.000	
9.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Rp30.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Rp30.000.000	
9.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Rp26.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Rp26.000.000	
9.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53	Rp15.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53	Rp15.000.000	
9.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Rp8.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Rp8.000.000	
9.5	Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	Rp112.000.000	Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	Rp112.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Rp1.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Rp1.000.000	
9.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Rp56.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Rp56.000.000	
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan	Rp177.600.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101 Laporan	Rp177.600.000	
10.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Rp1.600.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Rp1.600.000	
10.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	97	Rp176.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	99	Rp176.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	Rp354.074.776	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	Rp356.271.926	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	Rp45.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	Rp45.000.000	
11.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rp25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rp25.000.000	
11.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10	Rp20.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10	Rp20.000.000	
12	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	9 Laporan	Rp309.074.776	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	9 Laporan	Rp311.271.926	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
12.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Rp40.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Rp40.000.000	
12.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Rp12.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Rp10.197.150	
12.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Rp254.074.776	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Rp258.074.776	
12.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Rp3.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Rp3.000.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders karena tidak ada program/ kegiatan yang berkaitan langsung antara kegiatan masyarakat dengan tugas-tugas di bidang pengawasan/ pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

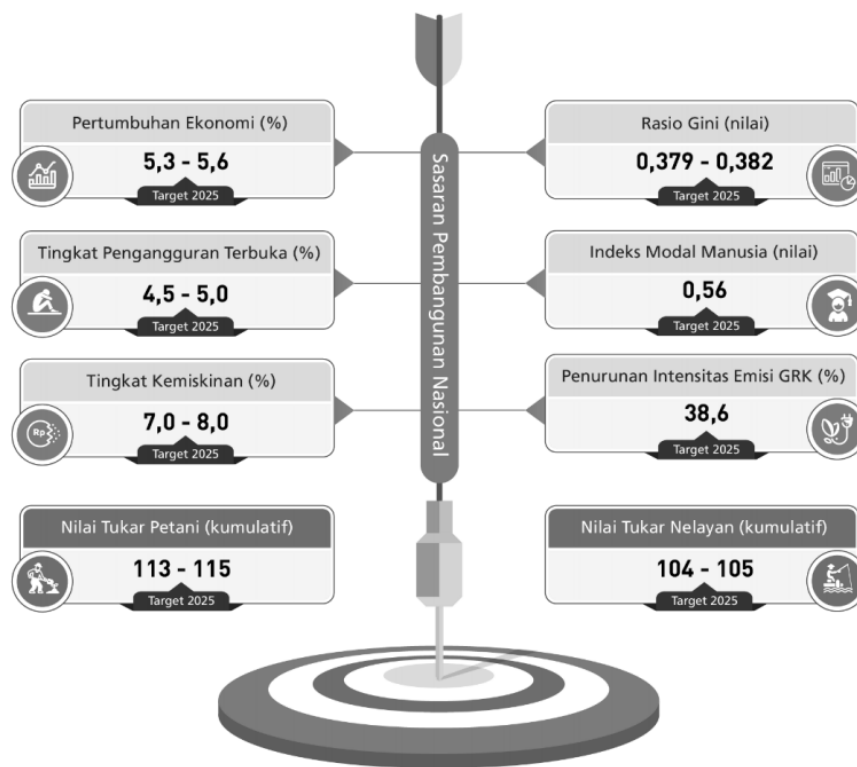
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0%
3. Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6
7. Nilai Tukar Petani 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan 104 – 105.



Gambar III.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2025, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Gambar III.2
Prioritas Nasional Tahun 2025

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Kemudian dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, maka sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri ikut berperan dalam mendukung agenda pembangunan nasional ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” melalui misi kedua RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri” dengan tujuan dan sasaran dari Inspektorat yang dapat mendukung pencapaiannya yang akan dijelaskan pada Bab 3.2.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan untuk mendukung misi kedua Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri”.

Berdasarkan pada misi kedua Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik.

Dengan mendasarkan misi kedua Kepala Daerah dan tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dengan indikatornya sebagai berikut :
 - a. Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun;
 - b. Indeks Integritas Daerah;
 - c. Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas;
 - d. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas; dan
 - f. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP.
2. Meningkatnya kinerja Inspektorat dengan indikator sarannya sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP Inspektorat;
 - b. Indeks profesionalitas ASN Inspektorat;
 - c. Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan;
 - d. Jumlah Inovasi Inspektorat; dan
 - e. IKM Inspektorat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pertama Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu “Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi” yang didukung dengan sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan dilakukan strategi sebagai berikut :

1. peningkatan peran APIP dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dengan arah kebijakannya adalah mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *consultant* dan *quality assurance*;
2. peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dengan arah kebijakannya adalah mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten, dan
3. optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern dengan arah kebijakannya mendorong peran

aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

Kemudian untuk mencapai tujuan yang kedua “Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik yang didukung dengan sasaran meningkatnya kinerja Inspektorat dilakukan dengan strategi penerapan reformasi birokrasi dengan arah kebijakannya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target kinerja, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, di tahun 2025 dalam periode tahun 2021-2026 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2021-2026, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima periode RPJMD tahun 2021-2026, dimana pada tahun ini Inspektorat harus menjalankan tugas utamanya untuk melakukan pengawasan intern, baik pengawasan rutin maupun pengawasan dengan mandatori. Selain itu, Inspektorat juga terus berupaya dalam peningkatan kompetensi APIP dalam membantu kelancaran proses pengawasan yang saat ini semakin bervariasi dengan berbagai ketentuan yang terus berkembang. Salah satunya pengawasan terkait dengan *Gender* yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2021 dengan monitoring evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Pengarusutamaan Gender (PPRG) sebagai upaya memenuhi ketentuan pengawasan yang semakin bervariasi dan berkembang.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				8.261.160.590				10.928.900.000
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7.479.288.664	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	9.978.900.000
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	6.500.000
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3	5.000.000
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	1.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6.668.735.307	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	8.911.000.000
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41	6.666.735.307	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		41	8.900.000.000
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	4.000.000
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		13	7.000.000
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	999.940	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	3.500.000
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	999.940	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2	3.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	177.199.530	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	258.000.000
6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	999.860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8	1.500.000
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		24	2.500.000
6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	1.999.810	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	2.500.000
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	999.860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4	1.500.000
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	171.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50	250.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	222.657.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	245.900.000
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1.997.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	4.000.000
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	54.999.110	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	55.000.000
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1.795.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	1.500.000
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	39.499.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	60.000.000
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	19.999.980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	2.400.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	8.048.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20	15.000.000
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	91.919.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15	80.000.000
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	999.150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2	1.500.000
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	999.860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	1.500.000
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	44.685.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	130.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	38.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	120.000.000
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	5.865.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	247.433.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	283.000.000
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	3.000.000
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	41.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	55.000.000
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	192.833.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	185.000.000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelayakan Barang Milik Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	113.576.887	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	141.000.000
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	19.694.270	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2	14.000.000
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11	80.188.617	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		17	105.000.000
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3	2.000.000
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	4.990.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	6.704.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	425.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	575.000.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135 Laporan	248.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		135 Laporan	332.000.000
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4	45.000.000
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	26.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5	45.000.000
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		54	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	8.000.000
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	112.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30	132.000.000
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	2.000.000
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37	56.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		37	85.000.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101 Laporan	177.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		99 Laporan	243.000.000
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	1.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99	176.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		97	240.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase realiasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	356.271.926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	375.000.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	60.000.000
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	30.000.000
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	30.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	311.271.926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Laporan	315.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53	30.000.000
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53	10.197.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53	8.000.000
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	258.074.776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	270.000.000
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53	7.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat tahun 2025 telah ditampilkan pada Tabel 3.1 di bab III.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan dalam 3 program, 12 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan uraiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program ini adalah persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah dengan targetnya 100% di tahun 2025. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2021-2026 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 7.479.288.664,00. Berikut adalah penjelasan atas 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 4.000.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan targetnya 3 Dokumen yaitu Renja, RKA dan DPA dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan targetnya 1 Laporan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase administrasi keuangan daerah yang di susun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 6.668.735.307,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan targetnya 41 orang/bulan dengan pendanaan sebesar Rp 6.666.735.307,00.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan

targetnya 1 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan targetnya 13 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 999.940,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen dengan targetnya 5 Dokumen yaitu 1 Dokumen Perencanaan, 2 Dokumen Pengamanan dan 2 Dokumen Rekonsiliasi. Pendanaan atas sub kegiatan ini sebesar Rp 999.940,00.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase tertib administrasi kepegawaian dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 177.199.530,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan targetnya 8 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 999.860,00.

2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan targetnya 12 Dokumen Pendataan dan 12 Dokumen Pengolahan atas Administrasi Kepegawaian dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan targetnya 12 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.999.810,00.

4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 999.860,00.

5) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan targetnya 50 Orang dengan pendanaan sebesar Rp 171.200.000,00.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 222.657.400,00 yang didukung dengan 10 sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 1.997.000,00.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 54.999.110,00.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 1.795.200,00.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 39.499.800,00.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 19.999.980,00.
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan targetnya 12 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 2.400.000,00.

7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan targetnya 20 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 8.048.000,00.

8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan targetnya 15 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 91.919.300,00.

9) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan targetnya 2 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 999.150,00.

10) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 999.860,00.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 44.685.700,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan targetnya 4 Unit yang akan digunakan untuk pembelian 2 Unit Laptop dan 2 Unit Printer dengan pendanaan sebesar Rp 38.820.000,00.

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan targetnya 3 Unit yang akan digunakan untuk pembelian Rak Arsip Besi sebanyak 3 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 5.865.700,00.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 247.433.900,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 4.000.000,00.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 41.600.000,00.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 9.000.000,00.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 192.833.900,00.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kelayakan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 113.576.887,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan targetnya 2 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 19.694.270,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan targetnya 11 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 80.188.617,00.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan targetnya 3 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan targetnya 10 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 4.990.000,00.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan targetnya 1 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 6.704.600,00.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program ini adalah Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT dengan targetnya 100% di tahun 2025. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2021-2026 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 2 kegiatan, 9 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 425.600.000,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target 135 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 248.000.000,00 yang didukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan targetnya 8 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 30.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan audit kinerja.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan targetnya 5 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 26.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya

target pada sub kegiatan ini adalah Asistensi LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD sebanyak 1 Laporan, dan Asistensi Kinerja Pemeriksaan BPK RI sebanyak 1 laporan.

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan targetnya 53 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 15.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD sebanyak 28 laporan dan evaluasi SAKIP Kecamatan sebanyak 25 laporan.

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan targetnya 1 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 8.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan reviu LKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dengan targetnya 30 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 112.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Audit Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Desa sesuai analisis risiko pada desa di Kabupaten Wonogiri sebanyak 30 laporan.

6) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan targetnya 1 Kesepakatan dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan targetnya 37 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 56.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebanyak 30 dokumen, Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan (Ikhtisar Semester I dan II) sebanyak 2 dokumen, Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 dokumen, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 dokumen dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan target 101 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 177.600.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 1.600.000,00.

2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan targetnya 99 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 176.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya

sub kegiatan ini beberapa diantaranya adalah pengawasan terkait Pemeriksaan Saldo Kas, Reviu DAK, Reviu Rancangan Akhir Renja OPD, Monitoring Evaluasi Gender, Reviu RKA, Reviu RKPD, Probit Audit, Pengawasan atas Urusan Pemerintahan, Reviu PAPBJ, Reviu KUA PPAS, Penanganan Aduan/Kasus dan Pengawasan Mandatori lainnya diluar pengawasan reguler yang ditujukan khusus pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Indikator program ini adalah Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan dengan targetnya 100% di tahun 2025. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2021-2026 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 356.271.926,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 45.000.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun targetnya 2 Rekomendasi untuk penyusunan PKPT Tahun 2025 dan PKPT Perubahan Tahun 2025 dengan pendanaan sebesar Rp 25.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun dengan targetnya 10 Rekomendasi yang digunakan untuk memfasilitasi Rapat Koordinasi terkait Kebijakan dalam Aktivitas Pengawasan yang dilaksanakan di Luar Daerah dengan pendanaan sebesar Rp 20.000.000,00.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi dengan targetnya 9 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 311.271.926,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 40.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan dalam Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi beserta Penjaminan Kualitasnya termasuk di dalamnya pendampingan dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR) bagi semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 53 perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan targetnya 53 perangkat daerah yang dicapai dengan pelaksanaan

Evaluasi Internal RB secara triwulanan dengan pendanaan sebesar Rp 10.197.150,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan targetnya 5 kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 258.074.776,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan atas ZI, MCP, Gratifikasi, Saber Pungli dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 3.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 53 perangkat daerah melalui pengumpulan Bukti Setor Pajak (SPT) bagi LHKAN dan bukti lapor kekayaan bagi LHKPN.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2025. Penyusunan Renja tahun 2025 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

5.1. Catatan Penting

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renja ini diharapkan dapat mencapai keberhasilan sesuai yang direncanakan. Namun, bukan tidak mungkin terjadi beberapa hal/risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan tersebut, seperti :

1. Risiko atas kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri karena sebagian besar keberhasilan atas indikator sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kerjasama dengan lintas OPD;
2. Risiko bertambahnya aktivitas pengawasan yang bersifat mandatory sehingga mengubah jadwal pelaksanaan aktivitas pengawasan reguler lainnya;
3. Risiko keterlambatan penerbitan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) karena jumlah SDM Pengawas yang terbatas;
4. Risiko atas kurangnya atensi untuk keberlanjutan manfaat/dampak dari aktivitas pengawasan yang sudah terlaksana (Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pengawasan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri kurang mendapat perhatian secara internal maupun Perangkat Daerah terkait)

karena keterbatasan SDM pengelola TLRHP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Kemudian untuk mengatasi kemungkinan risiko tersebut, berikut beberapa rencana pengendaliannya :

1. Meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai penggerak OPD lainnya untuk mendukung pencapaian sasaran;
2. Perlu dilakukan analisis atas aktivitas pengawasan prioritas agar aktivitas pengawasan mandatory dapat terlaksana lebih dulu serta pemanfaatan SDM APIP yang ada secara gabungan untuk melaksanakan beberapa aktivitas pengawasan reguler lainnya;
3. Meningkatkan motivasi kinerja dan pemberian penghargaan atas capaian terbaik dari APIP dalam penerbitan LHP tepat waktu;
4. Keterlibatan semua Tim Pengawas dalam menangani TLRHP pada masing-masing Bidang Pengawasan sesuai aktivitas pengawasan yang dilaksanakan di Tim selama SDM penanggungjawab atas TLRHP belum tersedia.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan. Kemungkinan atas perubahan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran utama pelaksanaan pengawasan, diharapkan seluruh unsur di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tetap menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama aktivitas pengawasan tahun 2025.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun laporan hasil pengawasan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan kegiatan di Inspektorat yang sudah direncanakan diharapkan tetap dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Renja 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan organisasi;
- b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. dalam rangka efektivitas pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala melalui laporan bulanan atas capaian target kinerja dan laporan triwulanan atas monitoring evaluasi Perjanjian Kinerja (PK).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002